

**PENGARUH DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA  
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN  
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



**Oleh :**

**M. AFRIZAL YUSUF**

**NIM 1505046075**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. M. Afrizal Yusuf

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M. Afrizal yusuf

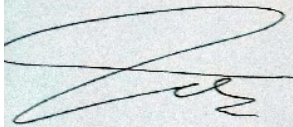
Nim : 1505046075

Judul : Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dan Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2018.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

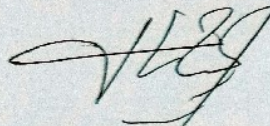
Pembimbing I



**Ida Nurlaeli, M. Ag**

NIP. 19781113 200901 2 004

Pembimbing II



**Arif Afendi, SE., M. Sc**

NIP. 19850526 201503 1 002



## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

### PENGESAHAN

Nama : M. Afrizal Yusuf  
NIM : 1505046075  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah  
Judul : **PENGARUH DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TERHADAP INDEKS PEMABNAGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2018**

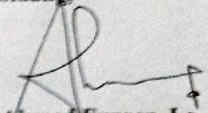
Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Baik, pada tanggal : **30 Juli 2019**

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam tahun akademik 2018/2019.

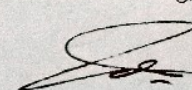
Semarang, 31 Juli 2019

Mengetahui,

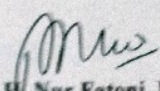
Ketua Sidang,

  
Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.  
NIP. 1975512182005011002

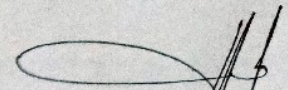
Sekretaris Sidang,

  
Ida Nur Laili, M.Ag.  
NIP. 197811132009012004

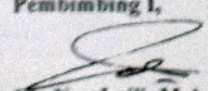
Penguji I,

  
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag  
NIP. 197308112000031004

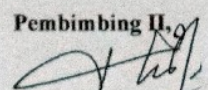
Penguji II,

  
Henny Yuningrum, S.E., M.Si  
NIP. 198106092007102005

Pembimbing I,

  
Ida Nur Laili, M.Ag.  
NIP. 197811132009012004

Pembimbing II,

  
Arif Efendi, S.E., M.Sc  
NIP. 198505262015031002

## MOTTO

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ

*“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”*

*(QS Al-A'raf : 96)*

*“Tidaklah Seorang muslim menanam pohon atau tumbuhan kemudian burung, manusia dan hewan memakan buah buahan dari pohon yang dia tanam kecuali hal tersebut terhitung sedekah baginya”*

*(HR. Bukhari)*

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai tanda bukti dan terimakasih, karya kecil berupa skripsi ini saya persembahkan kepada:

### ***Kedua Orang Tua tercinta***

Terimakasih yang tidak ada habisnya kepada kedua orang tua saya Bapak Supar dan Ibu Zuafa yang selalu memberikan kasih sayang dukungan baik moril maupun materil, motivasi, yang tidak pernah lelah memberi nasehat dan doa yang tidak pernah ada habisnya yang selalu mengiringi saya dalam mencapai cita-cita. Terimakasih atas semua dukungan yang telah di berikan sehingga saya dapat menjadi pribadi yang baik. Semoga karya kecil ini dapat membuat bapak dan ibubisa sedikit bangga atas pencapaian saya hingga saat ini.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 26 Juli 2019

Deklarator



M. Afrizal Yusuf

NIM 1505046075

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia pada 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Kementrian Keuangan. Sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Badan Pusat Statistika.

Data dianalisis dengan menggunakan regresi data panel. Diketahui bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa.

## **KATA PENGANTAR**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dan Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2018.”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun dengan kesabaran dan kesehatan serta berkat do'a, bantuan, dorongan, serta masukan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Warno S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Ibu Ida Nurlaeli M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Arif Afendi S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ali Murtadho , M.Ag., selaku Wali Dosen yang senantiasa mengarahkan dan memberikan semangat selama proses studi di UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.



7. Kedua Orang Tua penulis Bapak Supar dan Ibu Zuafa yang senantiasa memberi dukungan, kasih sayang, bantuan dan motivasi, serta doa yang senantiasa mengiringi penulis.
8. Keluarga besar Akuntansi Syariah angkatan 2015, khususnya AKSB-2015 yang telah menemani berjuang bersama dan memberi inspirasi serta motivasi kepada penulis.
9. Kontrakan KKS yang selalu menemani sejak awal, memberi semangat dan memotivasi Kepada penulis.
10. Keluarga besar KKN Reguler Angkatan ke-71 posko 92 yang telah mengajarkan makna bersosialisasi dan bermasyarakat dengan baik.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Jumlah Dana Transfer.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 1.2 Jumlah Dana Transfer.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 1.3 Nilai IPM Kab/Kota Jawa Barat.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 1.4 Nilai IPM Kab/Kota Jawa Tengah.....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 1.5 Nilai IPM Kab/Kota Jawa Timur.....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 2.1 Presentase Pembagian DBH Pajak.....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 2.2 Presentasi pembagian DBH Sumber Daya Alam.....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 2.3 Standarisasi Komponen IPM.....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 4.1 Kabupaten/Kota Di Jawa Barat.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 4.3 Uji Chow.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 4.4 Uji hausman.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4.6 Uji Heterokedastisitas.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 4.8 Estimasi Fixed Effect Model GLS Cross-section Weight.....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 4.9 Perbedaan Koefisien Kabupaten di Jawa Barat.....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Format Laporan Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah.....</b>	<b>32</b>
<b>Gambar 2.2 Format Neraca Transfer ke Daerah.....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 2.3 Laporan Operasional Transfer ke Daerah.....</b>	<b>34</b>
<b>Gambar 2.4 Laporan Perubahan Ekuitas Transfer ke Daerah.....</b>	<b>34</b>
<b>Gambar 2.5 Kerangka Berfikir.....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 4.1 Uji Normalitas.....</b>	<b>59</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Tabulasi Data**

**Lampiran 2 Uji Statistik**

**Lampiran 3 Tabel distribusi**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Beragamnya daerah di Indonesia yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan membutuhkan sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar yaitu sistem otonomi daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Artinya Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi layanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Konsekuensi dari desentralisasi fiskal adalah pengalihan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai dengan asas *money follows function*. Daerah diberikan keleluasaan untuk menciptakan atau menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri. Namun, kondisi daerah sangat beragam atau memiliki heterogenitas yang tinggi. Beberapa daerah memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah dan pajak daerah yang tinggi, di sisi lain ada daerah yang tidak memiliki sumber-sumber penerimaan yang memadai. Implikasinya pemerintah pusat harus tetap memberikan bantuan kepada daerah untuk menjalankan fungsi distribusi agar tercipta pemerataan hasil pembangunan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rudi Badrudin, *Ekonomika otonomi daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.16.

<sup>2</sup> Sukanto, "Dampak Dana Transfer Dan Peran Kelembagaan Terhadap Kinerja Pembangunan Di Provinsi Banten", Disertasi Doktor studi perencanaan pembangunan, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2018, h.6-7.



Dengan adanya otonomi daerah maka urusan yang menjadi hak dan tanggung jawab daerah meningkat. Untuk itu diperlukan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan.<sup>3</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kebutuhan pendanaan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pada APBD tersebut terdapat tiga struktur, yaitu Sisi Penerimaan, Sisi Pengeluaran dan Sisi Pembiayaan. Pada sisi penerimaan sebuah APBD terdapat sumber pendapatan daerah, yaitu berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada dana perimbangan itulah terdapat transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Saat ini, transfer ke Daerah selalu mendominasi struktur keuangan daerah. Daerah terlalu tergantung dari besaran dana transfer tersebut<sup>4</sup>. Pengelolaan Keuangan di era otonomi daerah seharusnya dilakukan secara optimal agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan pembiayaan daerah otonom. Fenomena yang terjadi selama ini, yaitu sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah ternyata selama ini belum mampu mewujudkan konsep otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.<sup>5</sup> Fenomena ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat hampir terjadi di semua daerah di Indonesia termasuk kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat.

Dana Transfer Daerah dan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi dengan mekanisme dana dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewahan DIY, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa yang di alokasikan langsung ke Pemerintah Desa yang hanya dikhususkan untuk kabupaten tidak untuk daerah Kota. Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

---

<sup>3</sup> Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.73

<sup>4</sup> Harsanto Nursandi, "Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah: Transfer Pusat Ke Daerah, Pemerataan Keuangan Daerah Dan Kapasitas Daerah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009 h. 258.

<sup>5</sup> Wempi Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesai, 2017, h 87.

yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peranan penting, kemana dana perimbangan dan dana desa akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana transfer tersebut.<sup>6</sup> Dengan demikian maka dana transfer dari pusat harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dari seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, pendapatan daerah dari dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2015-2018 paling tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur

**Tabel 1.1 Jumlah Dana Transfer**

(dalam miliar rupiah)

Per Kab/Kota	2015		2016	
	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata
Jawa Barat	Rp 55.062,84	Rp 2.039,37	Rp 59.675,74	Rp 2.210,21
Jawa Tengah	Rp 53.027,18	Rp 1.515,06	Rp 5.9007,50	Rp 1.685,93
Jawa Timur	Rp 61.040,99	Rp 1.606,34	Rp 66.966,34	Rp 1.762,27

Sumber : LKPP 2015-2018 Diolah

---

<sup>6</sup> Muhammad Hasan, "Pengaruh Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan", Jurnal Ekonomi Volume 3, Makassar, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2015, h.14.

**Tabel 1.2 Jumlah Dana Transfer**

(dalam miliar rupiah)

Per Kab/Kota	2017		2018	
	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata
Jawa Barat	Rp 64.734,65	Rp 2.397,58	Rp 65.036,38	Rp 2.408,75
Jawa Tengah	Rp 64378,16	Rp 1.839,36	Rp 64.1800,58	Rp 1.833,72
Jawa Timur	Rp 72.012,21	Rp 1.895,06	Rp 75.828,74	Rp 1.995,49

Sumber : LKPP 2015-2018 diolah

Seperti diketahui, transfer ke daerah dan dana desa merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang digunakan untuk memformulasikan struktur hubungan keuangan antara pusat dan daerah. hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya. Diketahui dana transfer ke daerah dan dana desa selama tahun 2015-2018 mengalami kenaikan. Naiknya anggaran transfer ke daerah dan dana desa ini bertujuan untuk mewujudkan nawacita yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan maupun aspek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Islam Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Pemikiran ini berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah

---

<sup>7</sup> Ditjen Perimbangan, "Dana Transfer ke Daerah untuk Nawacita", <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/anggaran-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-untuk-mewujudkan-nawacita/>, di akses 12 maret 2019.

untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya. Pembangunan dalam pemikiran Islam bermuara pada Al-Quran QS. Hûd [11]: 61

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

Pada kalimat **وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا** mengandung arti perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi ini

Kesejahteraan harus dilihat secara komprehensif yang juga meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar maqhasid syariah yang harus menjadi prioritas pembangunan yaitu Hifdz Ad-Din/memelihara agama, Hifdz An-Nafs/memelihara jiwa, Hifdz Al’Aql/memelihara akal, Hifdz An-Nasb/memelihara keturunan dan Hifdz Al-Maal/memelihara Harta.

Oleh karena itu, Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu akan berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan atau tercipta kesejahteraan. Dan sebaliknya apabila manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ia akan merasakan ketidakpuasan, tidak damai, tidak senang, tidak bahagia, tidak aman. Kondisi ini adalah kondisi tidak sejahtera.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ali Rama Dan Makhlani, “Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah”, Jurnal ekonomi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013, h.37 dan 39.



Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur bagaimana otonomi daerah dengan mekanisme transfer ke daerah dan dana desa dikelola baik untuk kesejahteraan masyarakat dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ). Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM adalah pengukuran perbandingan dari Kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak untuk semua negara/wilayah di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara atau wilayah adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.<sup>9</sup> Nilai IPM tiap daerah mengalami kenaikan tiap tahunnya berikut data perbandingan nilai IPM didaerah-daerah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah :

**Tabel 1.3 Nilai IPM Kab/Kota Jawa Barat**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
Bandung	70,05	70,69	71,02	71,75
Bekasi	71,19	71,83	72,63	73,49
Bogor	67,77	68,32	69,13	69,69
Ciamis	68,02	68,45	68,87	69,63
Cianjur	62,42	62,92	63,7	64,62
Cirebon	66,07	66,7	67,39	68,05
Garut	63,21	63,64	64,52	65,42
Indramayu	64,36	64,78	65,58	66,36

---

<sup>9</sup> Zul Fadhly , “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, h.2.

Karawang	67,66	68,19	69,17	69,89
Kuningan	67,19	67,51	67,78	68,55
Majalengka	64,75	65,25	65,92	66,72
Pangandaran	65,62	65,79	66,6	67,44
Purwakarta	67,84	68,56	69,28	69,98
Subang	66,52	67,14	67,73	68,31
Sukabumi	64,44	65,13	65,49	66,05
Sumedang	69,29	69,45	70,07	70,99
Tasikmalaya	63,17	63,57	64,14	65
Bandung Barat	65,23	65,81	66,63	67,46
Kota Bogor	73,65	74,5	75,16	75,66
Kota Sukabumi	71,84	72,33	73,03	73,55
Kota Bandung	79,67	80,13	80,31	81,06
Kota Cirebon	73,34	73,7	74	74,35
Kota Bekasi	79,63	79,95	80,3	81,04
Kota Depok	79,11	79,6	79,83	80,29
Kota Cimahi	76,42	76,69	76,95	77,56
Kota Tasikmalaya	69,99	70,58	71,51	72,03
Kota Banjar	69,31	70,09	70,79	71,25
<b>Rata rata</b>	<b>69,18</b>	<b>69,68</b>	<b>70,14</b>	<b>71,20</b>

Sumber : IPM BPS 2015-2018 diolah

**Tabel 1.4 Nilai IPM Kab/Kota Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
Banjarnegara	64,73	65,52	65,86	66,54
Banyumas	69,89	70,49	70,75	71,3
Batang	65,46	66,38	67,35	67,86
Blora	66,22	66,61	67,52	67,95
Boyolali	71,74	72,18	72,64	73,22
Brebes	63,18	63,98	64,86	65,68
Cilacap	67,77	68,6	68,9	69,56
Demak	69,75	70,1	70,41	71,26
Grobogan	68,05	68,52	68,87	69,32
Jepara	70,02	70,25	70,79	71,38
Karanganyar	74,26	74,9	75,22	75,54
Kebumen	66,87	67,41	68,29	68,8
Kendal	69,57	70,11	70,62	71,28
Klaten	73,81	73,97	74,25	74,79
Kudus	72,72	72,94	73,84	74,58
Magelang	67,13	67,85	68,39	69,11
Pati	68,51	69,03	70,12	70,71

Pekalongan	67,4	67,71	68,4	68,97
Pemalang	63,7	64,17	65,04	65,67
Purbalingga	67,03	67,48	67,72	68,41
Purworejo	70,37	70,66	71,31	71,87
Rembang	68,18	68,6	68,95	69,46
Semarang	71,89	72,4	73,2	73,61
Sragen	71,1	71,43	72,4	72,96
Sukoharjo	74,53	75,06	75,56	76,07
Tegal	65,04	65,84	66,44	67,33
Temanggung	67,07	67,6	68,34	68,83
Wonogiri	67,76	68,23	68,66	69,37
Wonosobo	65,7	66,19	66,89	67,81
Kota Magelang	76,39	77,16	77,84	78,31
Kota Surakarta	80,14	80,76	80,85	81,46
Kota Salatiga	80,96	81,14	81,68	82,41
Kota Semarang	80,23	81,19	82,01	82,72
Kota Pekalongan	72,69	73,32	73,77	74,24
Kota Tegal	72,96	73,55	73,95	74,44
<b>Rata rata</b>	<b>70,08</b>	<b>70,61</b>	<b>71,19</b>	<b>71,79</b>

Sumber : IPM BPS 2015-2018 diolah

**Tabel 1.5 Nilai IPM Kab/Kota Jawa Timur**



Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2019
Bangkalan	61,49	62,06	62,3	62,87
Banyuwangi	68,08	69	69,64	70,06
Blitar	68,13	68,88	69,33	69,93
Bojonegoro	66,17	66,73	67,28	67,85
Bondowoso	63,95	64,52	64,75	65,27
Gresik	73,57	74,46	74,84	75,28
Jember	63,04	64,01	64,96	65,96
Jombang	69,59	70,03	70,88	71,86
Kediri	68,91	69,87	70,47	71,07
Lamongan	69,84	70,34	71,11	71,97
Lumajang	63,02	63,74	64,23	64,83
Madiun	69,39	69,67	70,27	71,01
Magetan	71,39	71,94	72,6	72,91
Malang	66,63	67,51	68,47	69,4
Mojokerto	70,85	71,38	72,36	72,64
Nganjuk	69,9	70,5	70,69	71,23
Ngawi	68,32	68,96	69,27	69,91
Pacitan	64,92	65,74	66,51	67,33
Pamekasan	63,1	63,98	64,93	65,41
Pasuruan	65,04	65,71	66,69	67,41

Ponorogo	68,16	68,93	69,26	69,91
Probolinggo	63,83	64,12	64,28	64,85
Sampang	58,18	59,09	59,9	61
Sidoarjo	77,43	78,17	78,7	79,5
Situbondo	64,53	65,08	65,68	66,42
Sumenep	62,38	63,42	64,28	65,25
Trenggalek	67,25	67,78	68,1	68,71
Tuban	65,52	66,19	66,77	67,43
Tulungagung	70,07	70,82	71,24	71,99
Kota Kediri	75,67	76,33	77,13	77,58
Kota Blitar	76	76,71	77,1	77,58
Kota Malang	80,05	80,46	80,65	80,89
Kota Probolinggo	71,01	71,5	72,09	72,53
Kota Pasuruan	73,78	74,11	74,39	74,78
Kota Mojokerto	75,54	76,38	76,77	77,14
Kota Madiun	79,48	80,01	80,13	80,33
Kota Surabaya	79,47	80,38	81,07	81,74
Kota Batu	72,62	73,57	74,26	75,04
<b>Rata-Rata</b>	<b>68,93</b>	<b>69,81</b>	<b>70,35</b>	<b>71,24</b>

Sumber : IPM BPS 2015-2018 diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dan Tabel 1.2 Realisasi Dana Transfer ke Daerah dari seluruh Kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018 selalu mengalami kenaikan dan paling tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan nilai rata - rata Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. berdasarkan tabel 1.3, 1.4 dan 1.5 justru nilai Indeks Pembangunan Provinsi Jawa Barat paling rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pendapatan daerah dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang tinggi di daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat seharusnya diimbangi dengan capaian IPM karena pendapatan yang diterima dari dana transfer ke daerah dialokasikan ke belanja daerah untuk meningkatkan sektor yang mendukung peningkatan pemerataan pembangunan daerah termasuk Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian tentang Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti :

Hasan dan Agung (2018) meneliti tentang Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap IPM Dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011-2015. Hasil penelitian menyatakan bahwa PAD berpengaruh Terhadap IPM, DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM, namun berpengaruh secara tidak langsung melalui variabel Belanja Modal terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Riau

Budi (2017) meneliti tentang Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa PAD, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM, Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, berpengaruh negatif disebabkan disebabkan karena komponen alokasi dasar(Gaji PNS) masih menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah.

Rifa'i (2016) meneliti tentang Faktor- Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Yogyakarta Tahun 2008-2013. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PDRB dan PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPM.

Siswadi (2015) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota se provinsi NTB. Hasil penelitian menyatakan PAD berpengaruh positif dan signifikan, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PDRB, dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui belanja Modal. Hal ini bermakna bahwa DBH hanya akan dapat mempengaruhi IPM jika melalui Belanja Modal, peningkatan DBH akan turut meningkatkan belanja modal. Peningkatan belanja modal ini juga akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan unsur ekonomi yang tercermin dengan meningkatnya IPM.

Hayati dan Achasa (2016) meneliti tentang Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM Di Indonesia tahun 2000-2014. Hasil penelitian menyatakan Rasio PAD dan Rasio DBH SDA berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap IPM.

Widarwanto, Erlina dan Yahya (2014) meneliti tentang Pengaruh DAU, DAK, PAD, DBH, Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Terhadap IPM Dengan Belanja Pelayanan Dasar (BPD) Sebagai Moderating Variabel. Hasil penelitian menyatakan bahwa DAU, PAD dan DBH berpengaruh secara positif terhadap IPM. DAK dan BKP berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.

Harahap (2011) meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2008. Hasil Penelitian Menyatakan bahwa DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap

variabel dependen IPM. Sedangkan Secara parsial DAU, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian Budi Sinulingga (2007) bahwa sektor-sektor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap peningkatan IPM ialah sektor yang mengurangi kesenjangan yaitu sektor perdagangan, tenaga kerja dan industri. Sedangkan Sektor-sektor infrastruktur memiliki pengaruh langsung relatif kecil terhadap peningkatan IPM.

Afrilianto (2017) meneliti tentang Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Bogor. Hasil penelitian menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Rusydi (2012) meneliti tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Pendapatan Perkapita) Desa Di Kabupaten Takalar tahun 2007-2011. Hasil penelitian menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan permasalahan sebagai Berikut :

- 1) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ?
- 2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ?
- 3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ?

- 4) Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

- 1) Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
- 2) Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
- 3) Menganalisis pengaruh alokasi Dana Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
- 4) Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Akademis  
Bagi Peneliti Selanjutnya menambah bahan kajian, referensi tentang Dana Transfer Ke Daerah, Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia
- 2) Manfaat Praktis
  - a. Bagi Masyarakat  
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penggunaan APBN serta mengetahui peningkatan kualitas pembangunan manusia.
  - b. Bagi Pemerintah  
Bahan referensi untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen and Meckling (1976 ) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan *agent*, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang dan pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk mengelola kewenangan yang diberikan oleh pihak *principal*.<sup>1</sup>

Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah pusat sebagai *principal* melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelolala wilayah pemerintahan daerah. konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana transfer ke daerah dana desa yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* telah memberikan sumber daya kepada Pemerintah berupa pajak, sudah seharusnya pemerintah sebagai *agent* memberikan timbal balik kepada masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Riri Zelmianti, "Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal", Jurnal Universitas Islam '45 Bekasi, h.12.

<sup>2</sup> Ana Mei Rafika, "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung 2017, h.6.



Dalam Islam Teori Keagenan diberikan suatu kejelasan mengenai bentuk relasi yang mendasari hubungan pemerintah pusat dan daerah ataupun masyarakat dengan pemerintah bentuk relasi tersebut muncul dari konsep dasar amanah.<sup>3</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa :58)*

Pemerintah sebagai *agent* yang diamanati oleh rakyat, dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara adil, transparan dan bertanggung jawab.

## **2.1.2 Otonomi Daerah**

### **1. Pengertian Otonomi**

Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri dan *noumos* berarti hukum atau peraturan, UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pengertian dari otonomi tersebut. Dalam ketentuan umum UU No.32/2004 pasal 1 nomor 5 dan 6 menyebutkan: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam ketentuan umum UU No.32/2004, “Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan

---

<sup>3</sup> Elfianto. “Agency Theori Dalam Pespektif Syariah”. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang,.h.43.

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

## 2. Prinsip Otonomi

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>5</sup>

### 2.1.3 Desentralisasi Fiskal

#### 1. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan, politik, tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Mardiasmo (2009: 24) mengungkapkan, "Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi". Desentralisasi adalah salah satu sistem yang dipakai dalam

---

<sup>4</sup> UU No 32 Tahun 2004

<sup>5</sup> Rudi Badrudin, *Ekonomika otonomi daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.6

<sup>6</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah ; Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Erlangga, 2014, h.46

<sup>7</sup> UU No 32 Tahun 2004

pemerintahan merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. Dalam sistem desentralisasi terjadi penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah. Daerah yang mendapatkan kewenangan pemerintah pusat ini untuk mengatur rumah tangga daerah disebut otonomi.<sup>8</sup>

#### **2.1.4 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa**

Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewahan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.<sup>9</sup> Sebagai instrumen desentralisasi fiskal, dana transfer ke daerah dan dana desa diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ketentuan sumber daya keuangan yang di transfer ke daerah diatur dalam undang undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan.<sup>10</sup>

#### **2.1.5 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No.33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Berikut akan diuraikan

##### **1. Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai

---

<sup>8</sup> Aris Setia Budi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2012-2014", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, h.16.

<sup>9</sup> <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1854>

<sup>10</sup> Baldrick Siregar, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.80-

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil meliputi :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil pajak dialokasikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip, yaitu: (1) prinsip pembagian berbasis daerah penghasil (*by origin*), dan (2) prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan (*based on actual revenue*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, penyaluran berdasarkan prinsip *based on actual revenue*, mengandung arti bahwa DBH pajak disalurkan kepada daerah disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam tahun anggaran berjalan.

Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3).

Adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang terdiri dari PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21.

Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan dan kegiatan lain yang dilakukan wajib pajak orang pribadi.

3. Pajak Penghasilan pasal 25 serta pasal 29 WPOPND.

Adalah pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Cukai Hasil Tembakau.

Adalah bagian transfer ke daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil tembakau<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Baldric Siregar, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.84

**Tabel 2.1 Presentase Pembagian DBH Pajak**

<b>DBH Pajak</b>	<b>Pusat</b>	<b>Daerah</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Kab/Kota Lainnya</b>	<b>B.pungut</b>
PPB	10%	90%	16,20%	64,8%		9%
PPh Pasal 21	80%	20%	8%	12%		
PPh pasal 25 dan 29	80%	20%	8%	12%		
CHT	98%	2%	0,6%	0,8%	0,6%	

Sumber : PMK diolah

Arah kebijakan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak :

1. Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota
2. Menambah cakupan Dana Bagi Hasil PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan untuk program sesuai peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan.<sup>12</sup>

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama halnya dengan Dana Bagi Hasil pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan *prinsip based on actual revenue*.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) terdiri atas :

---

<sup>12</sup> Nota Keuangan dan APBN 2018

1. DBH SDA Kehutanan yang meliputi Iuran Izin Usaha Pengusahaan hutan (IIUPH), Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR)
2. DBH SDA pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi iuran tetap (*land-rent*) dan iuran produksi (*royalty*)
3. DBH SDA Perikanan
4. DBH SDA Minyak Bumi
5. DBH SDA Gas Bumi
6. DBH SDA Panas Bumi<sup>13</sup>

**Tabel 2.2 Presentasi pembagian DBH Sumber Daya Alam**

<b>DBH SDA</b>	<b>Pusat</b>	<b>Daerah</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Kab/Kota lainnya</b>
Kehutanan - IIUPH	20%	80%	16%	64%	
Kehutanan - PSDH	20%	80%	16%	32%	32%
Kehutanan - DR	60%	40%		40%	
Petambangan - Landrent	20%	80%	16%	64%	
Petambangan - Royalty	20%	80%	16%	32%	32%
Perikanan	20%	80%			80%
Minyak Bumi	84,5%	15,5%	3,1%	6,2%	6,2%
Gas Bumi	69,5%	30,5%	6,1%	12,2%	12,2%
Panas Bumi	20%	80%	16%	32%	32%

Sumber : PMK diolah

Arah kebijakan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam :

1. memperluas penggunaan Dana Bagi Hasil dana reboisasi yang ada di kabupaten/kota organisasi perangkat daerah yang ditunjuk kepala daerah, untuk mendanai pengelolaan tanaman hutan rakyat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, pengawasan dan perlindungan, penanaman pohon pada daerah aliran sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan-kiri sungai, pengadaan bangunan konservasi tanah dan air, pengembangan perbenihan, dan penelitian atau pengembangan

---

<sup>13</sup> Baldric Siregar, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.85

2. Menghapuskan pembatasan penggunaan sebesar 0,5 persen dari DBH SDA minyak dan gas Bumi yang semula hanya untuk bidang pendidikan menjadi dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah.<sup>14</sup>

## 2. Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan fungsinya sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Besaran Dana Alokasi Umum secara nasional adalah sekurang kurangnya 26% dari Penerimaan Dalam negeri (PDN) neto. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF)

Formula Dana Alokasi Umum(DAU) :

$$DAU = AD + CF$$

$$CF = KbF - KpF$$

Keterangan :

1. AD = Alokasi Dasar

Ditentukan atas dasar jumlah gaji PNSD, mencakup gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan

2. CF = Celah Fiskal

- a. KbF = Kebutuhan Fiskal

---

<sup>14</sup> Nota Keuangan dan APBN 2018

Merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan dari perkalian masing masing bobot variabel dengan Indeks jumlah penduduk, Indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, indeks PDRB perkapita.

b. KpF = Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan pendanaan daerah, ditentukan berdasarkan penjumlahan dari Pendapatan Asli daerah, DBH Pajak dan DBH SDA

15

Langkah Kebijakan yang diambil untuk menjaga agar DAU digunakan seoptimal mungkin dalam rangka penyediaan layanan dasar publik adalah dengan mensyaratkan 25 persen penggunaannya untuk belanja infrastruktur, yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN maupun petunjuk operasional penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri.

### 3. Dana Alokasi Khusus

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 33 pasal 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus fisik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendanai infrastruktur dan sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang

---

<sup>15</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah : Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Erlangga, 2014, h 63-65.



kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah. DAK fisik tersebut terdiri atas:

- DAK Reguler mencakup 11 bidang: (1) pendidikan (2) kesehatan dan KB (3) air minum (4) sanitasi (5) perumahan dan permukiman (6) pasar (7) industri kecil dan menengah (8) pertanian (9) kelautan dan perikanan (10) pariwisata (11) jalan.
  - DAK Penugasan, digunakan untuk mendanai kegiatan khusus dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
  - DAK Afirmasi, merupakan tambahan DAK yang dialokasikan khusus kepada daerah yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (area/spatial based),
- kebijakan DAK fisik adalah sebagai berikut:
1. pengalokasiannya berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) sesuai dengan bidang dan menu kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran yang menjadi prioritas pusat dan daerah.
  2. pengalokasiannya memperhitungkan kinerja pelaksanaan dua tahun sebelumnya
  3. Penajaman alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan per bidang antar daerah dan antara kegiatan yang akan didanai DAK dengan yang didanai dari belanja K/L.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK nonfisik dialokasikan dengan tujuan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. DAK non fisik terdiri dari :

1. Dana BOS

Adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja operasional sekolah dasar dan menengah

2. Dana BOP PAUD

Adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan bagi anak yang mengikuti pendidikan usia dini.

### 3. Dana TPG PNSD

Adalah dana tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan.

### 4. Dana Tamsil Guru PNSD

Adalah tambahan penghasilan guru PNS yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru

### 5. Dana BOK dan BOKB

Adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban rakyat terhadap pembiayaan di bidang kesehatan khususnya di puskesmas.

### 6. Dana PK2 UKM dan Naker

Adalah dana yang dihunakan untuk biaya pelatihan pengelolaan koperasi, usaha kecil menengah dan ketenaga kerjaan<sup>16</sup>

Untuk mengombinasikan prinsip top-down dan bottom-up dalam penentuan alokasi DAK, maka penyusunan proposal DAK oleh pemda berdasarkan pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh K/L adalah mekanisme terbaik. Petunjuk teknis dari K/L adalah untuk memberikan arah penggunaan DAK yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan bidang tersebut. Sedangkan penyusunan proposal oleh pemda adalah untuk menyesuaikan prioritas pembangunan bidang tersebut dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh K/L tentunya harus berpedoman pada RPJMN untuk target jangka menengah atau RKP untuk target satu tahunan. Sedangkan pemda perlu berpedoman pada RPJMD untuk menyiapkan usulan/proposal DAK tersebut. Sekiranya pedoman/petunjuk teknis DAK tidak sesuai/selaras dengan RPJMD, maka berarti proposal yang diusulkan sepenuhnya sebagai bagian dari upaya daerah untuk mendukung prioritas pembangunan nasional berbasis RPJMN, atau bahkan pemda bebas memutuskan untuk tidak

---

<sup>16</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematikan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, Jakarta : Salemba Empat, 2016, h.139.

mengusulkan DAK dalam bidang tersebut jika memang tidak relevan dengan RPJMD.

Dalam mekanisme DAK berdasarkan proposal daerah ini paling tidak ada tiga K/L (Kementerian Perencanaan/Bappenas, Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan) yang harus terlibat dalam menilai proposal daerah tersebut. Keterlibatan dari tiga K/L tersebut karena proposal DAK yang diajukan oleh pemda menyangkut tiga aspek, yaitu: (1) aspek prioritas bidang dan lokus pembangunan nasional, (2) pedoman/petunjuk teknis dalam rangka pencapaian target nasional di bidang yang menjadi sasaran DAK, dan (3) kelayakan biaya dan jumlah dana yang tersedia.<sup>17</sup>

#### **2.1.6 Dana Otsu, Keistimewaan DIY, DID**

##### **a. Dana Otonomi Khusus**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan dana otonomi khusus yang besarnya ditetapkan setara dengan dua persen dari pagu DAU nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan

##### **b. Dana Keistimewahan DIY**

Dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang dialokasikan dalam rangka mendukung pembiayaan bagi penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan keistimewaan tersebut adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang

---

<sup>17</sup> Bambang Juanda dan Hefrizal Handra, *Reformasi Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: KOMPAK, 2017, h 13.

ditentukan dalam undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah, yang meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

#### c. Dana Insentif Daerah

merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kategori/kriteria tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian DID ditujukan untuk mendorong daerah agar meningkatkan: (1) kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah, (2) kualitas pelayanan pemerintahan umum, (3) kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (4) upaya pengentasan kemiskinan.<sup>18</sup>

#### **2.1.7 Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan alokasi dasar (AD) sebagai unsur pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan alokasi formula (AF) yang memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nota Keuangan dan APBN 2018

<sup>19</sup> Nota Keuangan dan APBN 2018

### **2.1.8 Akuntansi Transfer Ke Daerah**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 (PSAP 01) tentang Penyajian Laporan Keuangan, transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. Sedangkan PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain dalam hal ini yaitu Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah.

#### **1. Dokumen Pencatatan Akuntansi**

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengacu kepada peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta ketentuan dan peraturan sehubungan dengan tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa , antara lain:

#### **1. Alokasi anggaran:**

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- b. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

#### **2. Pencatatan Beban/Realisasi:**

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- b. Surat Perintah Membayar (SPM).
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - d. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SKP-RTD).
  - e. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah DAK Fisik (SKP-RTD DAK Fisik).
  - f. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa (SKP-RDD).
3. Pencatatan pengembalian atas realisasi.
- a. Surat Perintah Membayar (SPM).
  - b. Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan dengan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
4. Pencatatan Piutang/ Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa:
- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan kurang bayar transfer dan/ atau lebih bayar transfer.
  - b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan potongan transfer untuk pihak ketiga.
  - c. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan potongan transfer untuk transaksi transitoris.
  - d. Dokumen lain yang dapat dipersamakan sebagai penetapan lebih bayar transfer.
  - e. Lembar Konfirmasi Transfer (LKT).
  - f. Daftar Potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

g. Daftar Pemotongan Lebih Salur.

5. Dokumen pendukung lainnya:

a. UU APBN.

b. Perpres Rincian APBN.

c. Perda mengenai APBD.

d. Laporan Realisasi Penyerapan DAK.

e. Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping.

f. Memo Penyesuaian.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Proses Pencatatan Akuntansi

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Bendahara Umum Negara (BUN) memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang terdiri dari:

a. Beban dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- b. Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  - c. Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  - d. Transaksi Transitoris Transfer ke Daerah dan Dana Desa.<sup>20</sup>
4. Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus / defisit dan pembiayaan , sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode .

### **Gambar 2.1 Format Laporan Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah**

---

<sup>20</sup> PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1					
URAIAN	CAT.	TA 20X1		% thd Angg.	TA 20X0
		ANGG.	REAL.		REAL.
PENDAPATAN					
PNBP Lainnya					
Penerimaan Kembali TKDD TAYL	B.1	xxx	xxx		xxx
JUMLAH PENDAPATAN					
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	B.2				
Dana Perimbangan	B.2.1	xxx	xxx		xxx
Dana Bagi Hasil	B.2.1.1	xxx	xxx		xxx
Dana Alokasi Umum	B.2.1.2	xxx	xxx		xxx
Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.1.3	xxx	xxx		xxx
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.1.4	xxx	xxx		xxx
Dana Insentif Daerah	B.2.2	xxx	xxx		xxx
Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	B.2.3	xxx	xxx		xxx
Dana Otsus Provinsi Aceh	B.2.3.1	xxx	xxx		xxx
Dana Otsus Provinsi Papua	B.2.3.2	xxx	xxx		xxx
Dana Otsus Provinsi Papua Barat	B.2.3.3	xxx	xxx		xxx
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua	B.2.3.4	xxx	xxx		xxx
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat	B.2.3.5	xxx	xxx		xxx
Dana Desa	B.2.4	xxx	xxx		xxx
JUMLAH TRANSFER					

Sumber : PMK Akuntansi 2018 diolah

- b. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu .

**Gambar 2.2 Format Neraca Transfer ke Daerah**

NERACA BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA PER 31 DESEMBER 20X1				
URAIAN	CATATAN	20X1	20X0	
ASET				
ASET LANCAR	C.1			
Piutang Transfer ke Daerah	C.1.1	xxxx	xxxx	xxxx
Piutang Transfer ke Daerah-Diestimasi	C.1.2	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Lancar		xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH ASET		xxxx	xxxx	xxxx
KEWAJIBAN	C.2			
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Transfer	C.2.1	xxxx	xxxx	xxxx
Utang Transfer-Estimasi	C.2.2	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxxx	xxxx	xxxx
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang Transfer Jangka Panjang	C.2.3	xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xxxx	xxxx	xxxx
EKUITAS				
Ekuitas	C.3	xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH EKUITAS		xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		xxxx	xxxx	xxxx

Sumber : PMK Akuntansi 2018 diolah

- c. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

pemerintah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan .

**Gambar 2.3 Laporan Operasional Transfer ke Daerah**

LAPORAN OPERASIONAL BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1			
URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
*** Jumlah Pendapatan Operasional			
<b>BEBAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	D.1		
Beban DBH	D.1.1	xxxx	xxxx
Beban DAU	D.1.2	xxxx	xxxx
Beban DAK Fisik	D.1.3	xxxx	xxxx
Beban Dana Otsus, DK DIY dan DID	D.1.4	xxxx	xxxx
Beban DAK Nonfisik	D.1.5	xxxx	xxxx
Beban Dana Desa	D.1.6	xxxx	xxxx
Beban Transfer Lain-lain	D.1.7	xxxx	xxxx
*** Jumlah Beban TKDD		xxxx	xxxx
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional		xxxx	xxxx
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	D.2		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1	xxxx	xxxx
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2	xxxx	xxxx
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		xxxx	xxxx
****			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	D.3	xxxx	xxxx

- d. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Gambar 2.4 Laporan Perubahan Ekuitas Transfer ke Daerah**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1			
URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	E.1	XXXX	XXXX
SURPLUS / DEFISIT - LO	E.2	XXXX	XXXX
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	XXXX	XXXX
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	XXXX	XXXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2	XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	XXXX	XXXX
Koreksi Lain-lain	E.3.4	XXXX	XXXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	E.4	XXXX	XXXX
KENAIKAN / (PENJURUNAN) EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR	E.5	XXXX	XXXX

- e. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dalam rangka pengungkapan yang memadai.<sup>21</sup> Format CALK sebagai berikut

#### A. Penjelasan Umum

1. Dasar Hukum
2. Profil dan Kebijakan Teknis
3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
4. Kebijakan Akuntansi

#### B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

---

<sup>21</sup> Erlina dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Jakarta : Salemba Empat, 2015, h 23

2. 1. Dana Perimbangan

2.2. Dana Insentif Daerah

2.3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

2 .4. Dana Desa

### C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

#### 1. Aset Lancar

1.1 . Piutang Transfer ke Daerah

1 .2. Piutang Transfer ke Daerah - Estimasi

#### 2. Kewajiban

2. 1. Utang Transfer

2 . 2. Utang Transfer - Estimasi

2.3. Utang Transfer Jangka Panjang

#### 3. Ekuitas

### D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

1. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

3. Surplus/Defisit - LO

### E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal

2. Surplus/Defisit - LO
  3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
  4. Transaksi Antar Entitas
  5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan Penting Lainnya
1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  2. Pengungkapan Lain-lain

Tujuan penerapan akuntansi dan menyusun laporan keuangan organisasi pemerintahan, meliputi berikut ini (Mardiasmo, 2009)

1. Memberikan Informasi Keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo, neraca dan kebutuhan sumber daya keuangan jangka pendek unit pemerintahan.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi.
3. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
4. Memberikan informasi guna memonitor dan mengevaluasi kinerja<sup>22</sup>

### **2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut *United Nation Development Programme (UNDP)*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup

---

<sup>22</sup> Abdul Halim dan Syam Kusufi, *Teori, konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h 283.

kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

#### 1. Dimensi Kesehatan

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *software Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

#### 2. Dimensi Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Cakupan anak untuk menghitung harapan lama sekolah adalah anak usia berumur 7 tahun keatas. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam susenas, harapan lama sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah dipesantren.

### 3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Standarisasi Komponen IPM**

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran Perkapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Sumber : IPM BPS diolah

1. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Dimensi Standar Hidup Layak

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Status capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompokkelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi”:  $IPM \geq 80$ .
2. Kelompok “tinggi”:  $70 \leq IPM < 80$ .
3. Kelompok “sedang”:  $60 \leq IPM < 70$ .



4. Kelompok “rendah”: IPM < 60.<sup>23</sup>

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasan dan Agung (2018) meneliti tentang Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap IPM Dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011-2015. Hasil penelitian menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif Terhadap IPM, DAU tidak berpengaruh terhadap IPM, DAK berpengaruh positif terhadap IPM melalui variabel Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Riau

Budi (2017) meneliti tentang Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa PAD, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM, Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, berpengaruh negatif disebabkan disebabkan karena komponen alokasi dasar(Gaji PNS) masih menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah.

Rifa'i (2016) meneliti tentang Faktor- Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Yogyakarta Tahun 2008-2013. Hasil penelitian meyakini bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PDRB dan PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPM.

Siswadi (2015) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota se provinsi NTB. Hasil penelitian menyatakan PAD berpengaruh positif dan signifikan, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PDRB, dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui belanja Modal. Hal ini

---

<sup>23</sup> Booklet, *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*, Jakarta : Badan Pusat Statitika 2015, h 102-106.

bermakna bahwa DBH hanya akan dapat mempengaruhi IPM jika melalui Belanja Modal, peningkatan DBH akan turut meningkatkan belanja modal. Peningkatan belanja modal ini juga akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan unsur ekonomi yang tercermin dengan meningkatnya IPM.

Hayati dan Achasa (2016) meneliti tentang Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM Di Indonesia tahun 2000-2014. Hasil penelitian menyatakan Rasio PAD dan Rasio DBH SDA berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap IPM.

Widarwanto, Erlina dan Yahya (2014) meneliti tentang Pengaruh DAU, DAK, PAD, DBH, Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Terhadap IPM Dengan Belanja Pelayanan Dasar (BPD) Sebagai Moderating Variabel. Hasil penelitian menyatakan bahwa DAU, PAD dan DBH berpengaruh secara positif terhadap IPM. DAK dan BKP berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.

Afrilianto (2017) meneliti tentang Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Bogor. Hasil penelitian menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Rusydi (2012) meneliti tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Pendapatan Perkapita) Desa Di Kabupaten Takalar tahun 2007-2011. Hasil penelitian menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.

## Gambar 2.5 Kerangka Berfikir

### 2.4 Hipotesis

1.  $H_1$  : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2.  $H_2$  : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3.  $H_3$  : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4.  $H_4$  : Dana Desa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Abdullah (2015), Metode penelitian kuantitatif adalah pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik dan bersifat obyektif. Variabel-variabel penelitian kuantitatif dapat diidentifikasi dan interkorelasi variabel dapat diukur dari data empiris dengan menggunakan sampel yang representatif dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung

#### **3.2 Populasi**

Menurut Abdullah (2015: 226) yang dimaksud populasi adalah kumpulan unit yang akan diteliti ciri cirinya, dan apabila populasinya terlalu luas, maka penelitian harus mengambil sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

#### **3.3 Sampel**

Abdullah (2015: 227) berpendapat bahwa "dalam praktik penelitian seorang peneliti jarang sekali melakukan keseluruhan kumpulan elemen (populasi)". Elemen adalah subyek dimana pengukuran dilakukan, elemen-elemen terpilih ini disebut sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 pemerintah kabupaten di Jawa Barat dikarenakan untuk 9 wilayah kota tidak mendapatkan transfer Dana Desa.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data adalah komponen penelitian artinya tanpa data tidak akan ada penelitian (Abdullah, 2015: 246). Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten di Jawa Barat Tahun 2015-2018. Data mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Sedangkan data mengenai Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik yaitu ([www.ipm.bps.go.id](http://www.ipm.bps.go.id)).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Sektor Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018 dan data Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2015-2018.

### **3.6 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah sebuah fenomena yang berubah-ubah dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu dan standar (Abdullah, 2015:174). Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **3.6.1 Variabel Bebas (*independent variable*)**

Variabel Bebas adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel terikat (Abdullah, 2015: 192). Variabel bebas dalam penelitian antara lain:

1. Variabel (X1) : Dana Bagi Hasil
2. Variabel (X2) : Dana Alokasi Umum
3. Variabel (X3) : Dana Alokasi Khusus

4. Variable (X4) : Dana Desa

### 3.6.2 Variabel Terikat (*Dependent variable*)

Menurut Abdullah (2015: 192) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia.

## 3.7 Teknik Analisis Data

### 3.7.1 Data Panel

Data panel adalah data regresi penggabungan data time series dan cross section. Data time series merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan. Sedangkan data cross section merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan. Penggabungan kedua jenis data dapat dilihat bahwa variabel terikat terdiri dari beberapa daerah (*cross section*) namun dalam berbagai periode waktu (*time series*), runtut waktu yang membahas sekumpulan observasi dalam rentang waktu yang ditentukan, (Widarjono, 2013, hal.229).

### 3.7.2 Model Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh yang merupakan gabungan dua *time series* dan *cross section* sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak dan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Selanjutnya penggabungan itu informasi data dari *time series* dan *cross section*. Dengan menggunakan bantuan program *Eviews Data* dalam penelitian ini menggunakan jenis data panel, sedangkan variabel independen yaitu Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa. Variabel dependen yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, adalah :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Ideks Pembangunan Manusia kabupaten Provinsi Jawa Barat periode 2015 – 2018 (Persen)

X1 = Dana Bagi Hasil (Miliar)

X2 = Dana Alokasi Umum (Miliar)

X3 = Dana Alokasi Khusus (Miliar )

X4 = Dana Desa (Miliar)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefesien Regresi

i = Kabupaten/Kota

t = Waktu (tahun)

### 3.7.3 Statistik Deskriptiv

statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standart devisiasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range dari variabel yang digunakan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Lokasi Umum Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten yang ada di Jawa Barat tahun 2015-2018. Penyajian statistik bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan interpretasi data

### 3.7.4 Estimasi Regresi Data Panel

#### 1. *Common Effect*

Tujuan dari metode ini Model Regresi *Common Effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, hanya dengan menggabungkan data cross section dan time series tanpa melihat perbedaan antar



waktu dan individu, maka model dapat diestimasi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) (Widarjono,2013:231).

## 2. *Fixed Effect Model*

Model ini mengantisipasi bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan intensif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Square Dummy Variable (LSDV).

## 3. *Random Effect Model*

Model ini akan mengstimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.pada model Random Effect perbedaan intesep di akomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan model *Random Effect* yakni menghilangkan heterokedasititas. Model ini juga disebut dengan *Error Component* (ECM) atau teknik (GLS).

### 3.7.4 Uji Kesesuaian Model

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan model dari ketiga model pada teknik estimasi model dengan data panel digunakan *chow Test* dan *Hausman Test*. *Chow Test* digunakan untuk menguji kesesuaian model antara model yang diperoleh dari data *pooled least square* dengan model yang diperoleh dari hasil *Chow Test* dengan model yang diperoleh dari *effect*.

#### 1. Uji Chow

*Chow test* menyebutkan sebagai pengujian F-statistik adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *Pooled Least Square* atau *Fixed*

*Effect*. Sebagaimana yang diketahui bahwa terkadang asumsi bahwa setiap unit cross section memiliki pelaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkan setiap unit cross section memiliki pelaku yang berbeda. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut.

$H_0$  : Model *Pooled Test Square*

$H_1$  : Model *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol ( $H_0$ ) adalah dengan menggunakan F-statistik seperti yang dirumuskan oleh Chow :

$$F = (RSS1 - RSS2) / m (RSS2) / (n - k)$$

$RSS1$  = *Residual Sum Square* hasil pendugaan model *Fixed effect*

$RSS2$  = *Residual Sum Square* hasil pendugaan *Pooled Least Square*

$n$  = jumlah data cross section

$m$  = jumlah data time series

$k$  = jumlah variabel penjelas

Statistik Chow mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas ( $m$ ,  $n$ ,  $k$ ) jika nilai Chow statistik (F-stat) hasil pengujian lebih besar dari F tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa Nol sehingga model yang digunakan adalah model *fixed effect*, dan begitu juga sebaliknya.

## 2 Uji Hausman

*Hausman Test* adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau model *random effect*. Seperti

apakah yang diketahui bahwa penggunaan model fixed effect mengandung suatu unsure *trade-off* yaitu derajat bebas memasukkan variabel dummy. Namun, penggunaan metode random effect juga harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Hausman Test dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Model *Random Effect*

$H_1$  : Model *Fixed Effect*

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol maka digunakan Ststistik Hausman dan membandingkan dengan *Chi-Square*. Statistik uji hausman ini mengikuti distribusi statistic *Chi-Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k adalah jumlah variabel independen. Jika menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila kita gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik *Hausman* lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang bisa digunakan *random effect*.

### 3.7.5 Uji Pelanggaran Asumsi

Model regresi berganda yang diestimasi melalui *Ordinary Least Squares* (*OLS*) harus dapat memenuhi asumsi kriteria *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*) yang dikenal dengan nama *teorema Gauss-Markov*. *Estimator* bersifat *best* yang berarti memiliki varians terkecil/minimum dibandingkan dengan parameter yang diperoleh melalui metode linier lain (Non OLS), estimator juga bersifat linier terhadap variabel dependen serta bersifat unbiased yang berarti nilai estimator mendekati nilai populasi. Ada beberapa permasalahan yang bisa menyebabkan sebuah *estimator* tidak dapat memenuhi asumsi kriteria *BLUE*, yaitu:

#### a. Normalitas

Winarno (2015) menyatakan bahwa salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. Cara mengujinya dengan alat analisis dan Eviews menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Sebenarnya

normalitas data dapat dilihat dari gambar histogram, namun polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal sehingga sulit disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien *Jarque-Bera* dan *probabilitasnya*. Kedua angka ini bersifat saling mendukung.

- Jika nilai *probabilitas Jarque-Bera* lebih besar dari 5%, maka data berdistribusi normal.

#### b. Multikolinearitas

Winarno (2015) menjelaskan mengenai multikolinearitas yaitu adanya hubungan linier antara variabel independen. Terjadinya multikolinearitas ditunjukkan dengan indikator, yaitu:

- Jika nilai R-square ( $R^2$ ) tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan.

#### c. Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi dasar dari metode regresi linier adalah varians tiap unsur error adalah suatu angka konstan yang sama atau homogen. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians tiap unsur error tidak konstan. Winarno (2015) menyatakan Salah satu teknik pendugaan yang cocok jika terjadi heteroskedastisitas jika ragam sisaan diketahui adalah menggunakan metode kuadrat terkecil terboboti (WLS, *weighted least squares*) yang merupakan kasus khusus dari teknik ekonometrika yang lebih umum, yang disebut dengan GLS (*generalized least squares*). Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan metode GLS *Weights Crosssection weight* yang tersedia dalam program EViews dimana jika terdapat masalah heteroskedastisitas, nilai *Sum squared residu Weighted Statistic* akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai *Sum squared resid Unweighted Statistic*.

#### d. Autokorelasi

Winarno (2015) menyatakan bahwa autokorelasi adalah hubungan antara residual atau observasi dengan residual observasi lainnya. Data yang mengandung autokorelasi maka estimator yang didapatkan masih linier, tidak bias tetapi tidak mempunyai varian yang minimum (*no longer best*). Dengan demikian, salah satu cara memeriksa ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji *Durbin-Watson* (DW).

### 3.7.6 Uji Estimasi Statistik

#### 1. Uji Secara Simultan (F-statistik)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F (hitung) dengan nilai F (tabel). Jika nilai F statistik  $> F$  tabel maka terdapat hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent. Sebaliknya jika nilai F statistik  $< F$  tabel maka tidak terdapat hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent.

Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan probabilitas signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). a. Jika  $\text{prob sig} > \alpha$ , maka tidak terdapat hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent. sebaliknya Jika  $\text{prob sig} < \alpha$ , maka terdapat hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent.

#### 1. Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang semakin mendekati 1 berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent.

## 2. Uji Secara Parsial (t-Statistik)

Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai berikut: jika t-Statistik > t-tabel atau nilai Probabilitas Statistik <  $\alpha$ . maka artinya bahwa variabel independen secara parsial signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Model regresi yaitu :

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

dimana:

$Y_{it}$  = indeks pembangunan manusia (persen)

$X_1$  = Dana Bagi Hasil (miliar)

$X_2$  = Dana Alokasi Umum (miliar)

$X_3$  = Dana Alokasi Khusus (miliar)

$X_4$  = Dana Desa (miliar)

$\alpha$  = konstanta

$\beta_i$  = koefisien regresi peubah ke-i

$i = 1, 2, \dots, 18$  (data cross section 18 Kabupaten)

$t$  = deret waktu (data time series tahun 2015-2018).



## BAB IV

### ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi terbesar di pulau Jawa yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan laut Jawa di utara, di timur berbatasan dengan Jawa Tengah, Samudra Hindia di sebelah selatan dan Banten dan DKI Jakarta di sebelah barat. Jawa Barat terdiri dari atas 18 Kabupaten, 9 Kota, 627 Kecamatan, 645 Kelurahan dan 5.312 Desa. Berikut Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat

**Tabel 4.1 Kabupaten/Kota Di Jawa Barat**

No	Kabupaten	No	Kabupaten	No	Kota
1	Bandung	10	Kuningan	1	Kota Bogor
2	Bekasi	11	Majalengka	2	Kota Sukabumi
3	Bogor	12	Pangandaran	3	Kota Bandung
4	Ciamis	13	Purwakarta	4	Kota Cirebon
5	Cianjur	14	Subang	5	Kota Bekasi
6	Cirebon	15	Sukabumi	6	Kota Depok
7	Garut	16	Sumedang	7	Kota Cimahi
8	Indramayu	17	Tasikmalaya	8	Kota Tasikmalaya
9	Karawang	18	Bandung Barat	9	Kota Banjar

Sumber : id.wikipedia.org



## 4.2 Pegujian dan Hasil Analisis

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif**

Sample: 2015 2018

	IPM	DBH	DAU	DAK	DD
Mean	67.2719444...	154.312916...	1332.79819...	368.056527...	215.764305...
Median	67.4149999...	111.58	1253.415	396.955	204.635
Maximum	73.49	432.67	2163.44	737.02	1153.1
Minimum	62.42	37.0200000...	523.97	43.96	27.48
Std. Dev.	2.51210962...	98.7079757...	364.156033...	176.806797...	147.655106...
Skewness	0.21956432...	1.16790266...	0.12235650...	-0.0857518...	3.56116627...
Kurtosis	2.45576346...	3.50778858...	3.18742226...	2.09236466...	23.5674164...

Sumber : Data Eviews diolah 2019

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

- a. Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama empat tahun sebesar 67,27
- b. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai terendah sebesar 62,42 adalah kabupaten Cianjur pada tahun 2015.
- c. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi sebesar 73,49 adalah Kabupaten Bekasi pada tahun 2018.
- d. Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai standar deviasi sebesar 2,51

#### 2. Dana Bagi Hasil

- a. Dana Bagi Hasil pada Kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama empat tahun sebesar Rp 154,31 miliar.
- b. Dana Bagi Hasil pada Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai terendah sebesar Rp 37,02 miliar adalah kabupaten Pangandaran pada tahun 2015.

c. Dana Bagi Hasil Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi sebesar Rp 432.67 miliar adalah Kabupaten Bekasi pada tahun 2016.

d. Dana Bagi Hasil memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 98,70 miliar

### 3. Dana Alokasi Umum

a. Dana Alokasi Umum pada kabupaten di Jawa barat memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama empat tahun sebesar Rp 1.332,79 miliar

b. Dana Alokasi Umum pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai terendah sebesar Rp 523,96 miliar adalah Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

c. Dana Alokasi Umum pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi sebesar Rp 2.163,43 miliar adalah kabupaten Bogor pada tahun 2015.

d. Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 364,16 miliar

### 4. Dana Alokasi Khusus

a. Dana Alokasi Khusus pada kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama empat tahun sebesar Rp 368,06 miliar.

b. Dana Alokasi Khusus pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai terendah sebesar Rp 43.96 miliar adalah kabupaten Purwakarta pada tahun 2015.

c. Dana Alokasi Khusus pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi sebesar Rp 737.02 miliar adalah kabupaten Bandung pada tahun 2018.

d. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 176,81 miliar

### 5. Dana Desa

a. Dana Desa pada kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama empat tahun sebesar Rp 200,49 miliar.

b. Dana Desa pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai terendah sebesar Rp 27,46 miliar adalah kabupaten Pangandaran pada tahun 2015.

- c. Dana Desa pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi sebesar Rp 402,07 miliar adalah Kabupaten Bogor pada tahun 2018.
- d. Dana Desa memiliki nilai standar Deviasi sebesar Rp 98.71 miliar.

### 3.7.4 Hasil Uji Kesesuaian Model

#### 1. Uji Chow

dilakukan untuk mengetahui apakah model yang lebih baik untuk digunakan adalah pendekatan *common effect* atau pendekatan *fixed effect model* Uji ini dilakukan dengan prosedur uji F statistik

**Tabel 4.3 Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	52.231428	(17,50)	0.0000
Cross-section Chi-square	211.079295	17	0.0000

Sumber : Data Eviews diolah 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh angka F statistik sebesar 52,231 dengan F Tabel pada df (17,50) adalah 1,83 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai F Statistik > F Tabel sehingga kesimpulan dari hasil uji Chow adalah menolak  $H_0$ , sehingga model *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan.

#### 1. Uji Hausman

Hausman test digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square*

**Tabel 4.4 Uji hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.688692	4	0.0006

Sumber : Data Eviews diolah 2019

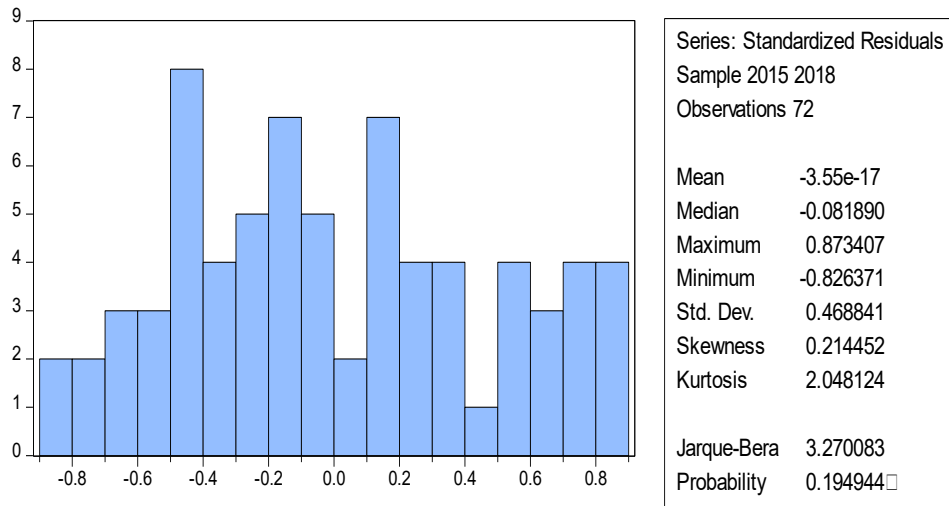
Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh angka Chi square statistik sebesar 19,688 dengan Chi square Tabel pada df (4) adalah 9,488 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai Chi square statistik > Chi square Tabel sehingga kesimpulan dari hasil uji Chow adalah menolak  $H_0$ , sehingga model *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan.

### 3.7.5 Hasil Uji Pelanggaran Asumsi

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal

**Gambar 4.1 Uji Normalitas**



Sumber : Data Eviews diolah 2019

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai probabilitas Jaque-Bera sebesar 0,194 > dari 0,05 sehingga dapat diimpulakan data berdistribusi normal

## 2.Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai perhitungan koefisien korelasi Model yang dipilih harus terbebas dari multikolinearitas yaitu apabila nilai koefisien korelasinya lebih rendah dari 0.80 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi tinggi antara variabel bebas. antar variabel bebas

**Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas**

	DBH	DAU	DAK	DD
DBH	1.000.000	0.382578	0.238694	0.015056
DAU	0.382578	1.000.000	0.582013	0.272138
DAK	0.238694	0.582013	1.000.000	0.413565
DD	0.015056	0.272138	0.413565	1.000.000

Sumber : Data Eviews diolah 2019

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa korelasi antar variabel bebas nilainya  $< 0.80$ . seperti DBH bertemu DAU nilainya  $0.382 < 0.80$  DBH bertemu DAK nilainya  $0.238 < 0.80$  dan DBH bertemu DD nilainya  $0.015 < 0.80$ . dari semua nilai tersebut terlihat korelasinya yang tidak melebihi 0.80. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terjadi multikolinearitas sehingga kriteria bebas multikolinearitas terpenuhi

## 2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan metode *GLS Weights Crosssection weight*, dimana jika terdapat masalah heteroskedastisitas, nilai Sum squared residu Weighted Statistic akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai Sum squared resid Unweighted Statistic.

**Tabel 4.6 Uji Heterokedastisitas**

Weighted Statistics			
R-squared	0.968244	Mean dependent var	72.25126
Adjusted R-squared	0.954906	S.D. dependent var	17.47129
S.E. of regression	0.556228	Sum squared resid	15.46948
F-statistic	72.59520	Durbin-Watson stat	2.019656
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.964864	Mean dependent var	67.27194
Sum squared resid	15.74295	Durbin-Watson stat	1.976373

Sumber : Data Eviews diolah 2019

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Sum Squared Weighted 15,469 lebih kecil dari nilai Sum Squared Unweighted yaitu 15,742. Dengan demikian maka model estimasi terindikasi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas. Untuk menghilangkan adanya heteroskedastisitas maka model harus diperlakukan dengan cara *Cross Section Weight*. Model dalam penelitian ini menggunakan hasil estimasi *Fixed Effect Model* dengan metode pembobotan *GLS Weight Cross-*

*Section Weight* sehingga masalah heteroskedastisitas langsung dapat terkoreksi dan model telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

### 3. Uji Autokorelasi

Pengujian untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson Statistic pada model dan membandingkannya dengan nilai DW-Tabel.

**Tabel 4.7 Uji Autokorelasi**

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.965168	Mean dependent var	67.27194
Adjusted R-squared	0.950539	S.D. dependent var	2.512110
S.E. of regression	0.558689	Akaike info criterion	1.920021
Sum squared resid	15.60667	Schwarz criterion	2.615669
Log likelihood	-47.12074	Hannan-Quinn criter.	2.196960
F-statistic	65.97493	Durbin-Watson stat	1.913117
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data Eviews Dioah 2019

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Durbin watsaon sebesar 1,9131. dnn mengetahui n adalah 72 dan jumlah vaiabel bebas 4 diperoleh nilai dl 1,5029 dan du 1,7366. dengan demikian  $du < DW < 4-du$  ( $1,7366 < 1,9131 < 2,2634$ ) maka disimpulkan tidak terjadi autkorelasi.

### 3.7.6 Analisis Hasil Uji Estimasi Statistik

**Tabel 4.8 Estimasi Fixed Effect Model GLS Cross-section Weight**

Dependent Variable: IPM  
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 08/02/19 Time: 03:29  
 Sample: 2015 2018  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 18  
 Total panel (balanced) observations: 72  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.81730	2.336370	30.31082	0.0000
DBH	-0.005546	0.002577	-2.151783	0.0363
DAU	-0.003388	0.001750	-1.935727	0.0586
DAK	0.004845	0.000641	7.558538	0.0000
DD	0.000200	0.000614	0.326167	0.7457

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.968244	Mean dependent var	72.25126
Adjusted R-squared	0.954906	S.D. dependent var	17.47129
S.E. of regression	0.556228	Sum squared resid	15.46948
F-statistic	72.59520	Durbin-Watson stat	2.019656
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data Eviews diolah 2019

Model penelitian ini menggunakan *Fix Effect Model dengan GLS Cross-section Weight*. Dapat dijelaskan melalui persamaan regresi berikut :

$$IPMit = 70,817 - 0,005 DBHit - 0,003 DAUit + 0,004DAKit + 0,0002it + eit$$

Dari persamaann regresi dapat di interpretasi sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 70,817 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen dianggap konstan maka rata-rata nilai Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat sebesar 70,817 %
- Koefesien regresi Dana Bagi Hasil sebesar - 0,005 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Bagi Hasil sebesar 1 miliar akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat sebesar 0,005 %.



- c. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar - 0,003 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1 miliar akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat sebesar 0,003 %.
- d. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,004 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana alokasi Khusus sebesar 1 miliar akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat sebesar 0,004 %.
- e. Koefisien regresi Dana Desa sebesar 0,0002 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Desa sebesar 1 miliar akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat sebesar 0,0002 %.

#### 1. Uji Secara Simultan (F Statistik)

Berdasarkan Hasil pengujian tabel 4.9 diperoleh nilai probabilitas F statistik sebesar  $0,0000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi fixed effect variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen.

#### 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan Hasil pengujian tabel 4.9 menunjukkan nilai R squared sebesar 0,968 hal ini berarti 96,38% variasi Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan oleh variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa. Sedangkan 3,62% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti.

#### 3. Uji Secara Parsial

Berdasarkan Hasil pengujian pada tabel 4.9 maka pembuktian hipotesis adalah sebagai berikut :

- 1) Pada variabel Dana Bagi hasil diperoleh nilai koefisien - 0,005 dan nilai probabilitas  $0,036 < 0,05$  yang berarti Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian maka H1 ditolak.

- 2) Pada variabel Dana Alokasi Umum diperoleh nilai koefisien - 0,003 dan nilai probabilitas  $0,058 > 0,05$  yang berarti Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian maka H2 ditolak.
- 3) Pada variabel Dana Alokasi Khusus diperoleh nilai koefisien 0,004 dan nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$  yang berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian maka H3 diterima
- 4) Pada variabel Dana Desa yang berarti Dana Desa diperoleh nilai koefisien 0,0002 dan nilai probabilitas  $0,745 < 0,05$  yang berarti Dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian maka H1 ditolak.

### **4.3 Interpretasi Hasil Analisis Data**

#### **1. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di Jawa Barat. Pada Uji secara parsial diperoleh nilai koefisien - 0,005 dan nilai probabilitas  $0,036 < 0,05$  yang berarti Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya kenaikan Dana Bagi Hasil akan menyebabkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian hipotesis H<sub>1</sub> ditolak.

Hal ini bertentangan dengan teori yang ada, dimana Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif. Ketidaksiharian ini diakibatkan Realisasi Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah kurang berkontribusi untuk pembangunan khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan Ekonomi serta Kebijakan penghapusan pembatasan penggunaan sebesar 0,5 persen dari DBH SDA minyak dan gas Bumi yang semula hanya untuk bidang pendidikan menjadi dapat

digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah hal ini menyebabkan kenaikan Dana bagi Hasil akan menurunkan Indeks pembangunan Manusia. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Siswadi (2015) dan Hayati dan Achasa (2016) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hipotesis Kedua menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di Jawa Barat. Diperoleh nilai koefisien  $-0,003$  dan nilai probabilitas  $0,058 > 0,05$  yang berarti Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya kenaikan Dana Alokasi Umum tidak mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian hipotesis  $H_2$  ditolak.

Hal ini bertentangan dengan teori yang ada, dimana Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif. Alokasi Dana Alokasi Umum yang tinggi dengan komponen alokasi dasar masih menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah, Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai (gaji PNS Daerah) sehingga sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai tidak digunakan untuk belanja modal. sehingga peningkatan Dana Alokasi Umum tidak mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia. Namun penelitian ini sejalan dengan Hasan dan Agung (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## 3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hipotesis Ketiga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di Jawa Barat. diperoleh nilai koefisien  $0,004$  dan nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$  yang berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Artinya kenaikan Dana Alokasi Khusus mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia namun. Dengan demikian maka hipotesis H<sub>3</sub> diterima.

Dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus digunakan untuk belanja modal yang didalamnya mencakup bidang kesehatan pendidikan dan infrastruktur lain dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus dengan cara metode *proposal based* sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan prioritas daerah sehingga kenaikan Dana Alokasi khusus akan menyebabkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Hasan dan Agung (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui belanja modal.

#### 4. Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hipotesis Keempat menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di Jawa Barat. diperoleh nilai koefisien 0,0002 dan nilai probabilitas  $0,745 < 0,05$  yang berarti Dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya kenaikan Dana Desa tidak mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian maka hipotesis H<sub>4</sub> ditolak.

Pemanfaatan Dana Desa lebih banyak digunakan untuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan embung sementara itu pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan dan ekonomi belum optimal menyebabkan Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

**Tabel 4.9 Perbedaan Koefisien Kabupaten di Jawa Barat**

	Kabupaten	Effect	Koefisien	Koefisien/kab
1	Bandung	5,852	70,817	76,669
2	Bekasi	6,358	70,817	77,175

3	Bogor	3,606	70,817	74,423
4	Ciamis	0,61	70,817	71,427
5	Cianjur	-4,122	70,817	66,695
6	Cirebon	-0,304	70,817	70,513
7	Garut	-1,944	70,817	68,873
8	Indramayu	-1,726	70,817	69,091
9	Karawang	2,048	70,817	72,865
10	Kuningan	-0,455	70,817	70,362
11	Majalengka	-2,369	70,817	68,448
12	Pangandaran	-2,896	70,817	67,921
13	Purwakarta	0,428	70,817	71,245
14	Subang	0,188	70,817	71,005
15	Sukabumi	-1,539	70,817	69,278
16	Sumedang	1,929	70,817	72,746
17	Tasikmalaya	-3,875	70,817	66,942
18	Bandung Barat	-1,787	70,817	69,03

Sumber: Data Eviews diolah 2019

Berdasarkan Tabel diatas terdapat hasil dari olah data yang telah dilakukan dengan menggunakan program *eviews*, maka dapat diketahui perbedaan dari 18 kabupaten dengan melihat effect dari masing-masing Kabupaten Jawa Barat. Nilai koefisien diantaranya sebagai berikut :

1. Bandung : Nilai koefisien 76,669 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Bandung pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 76,669 %.
2. Bekasi : Nilai koefisien 77,175 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Bekasi pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 77,175 %.

3. Bogor : Nilai koefisien 74,423 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Bogor pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 74,423 %.
4. Ciamis : Nilai koefisien 71,427 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Ciamis pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 71,427 %.
5. Cianjur : Nilai koefisien 66,695 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Cianjur pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 66,695%.
6. Cirebon : Nilai koefisien 70,513 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Cirebon pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 70,513%.
7. Garut : Nilai koefisien 68,873 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Garut pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 68,873 %.
8. Indramayu : Nilai koefisien 69,091 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Indramayu pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 69,091 %.
9. Karawang : Nilai koefisien 72,865 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Karawang pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 72,865%.
10. Kuningan : Nilai koefisien 70,362 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Kuningan pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 70,362 %.
11. Majalengka : Nilai koefisien 68,448 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Majalengka pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 68,448 %.

12. Pangandaran : Nilai koefisien 67,921 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Pangandaran pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 67,921 %.
13. Purwakarta : Nilai koefisien 71,245 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Purwakarta pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 71,245 %.
14. Subang : Nilai koefisien 71,005 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Subang pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 71,005 %.
15. Sukabumi : Nilai koefisien 69,278 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Sukabumi pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 69,278 %.
16. Sumedang : Nilai koefisien 72,460 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Sumedang pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 72,460%.
17. Tasikmalaya : Nilai koefisien 66,942 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Tasikmalaya pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 66,942 %.

Bandung barat : Nilai koefisien 72,746 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia daerah kabupaten Bandung Barat pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 72,746%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini dilihat dari nilai sig uji  $t$   $0.03 < 0.05$ . Artinya kenaikan Dana Bagi Hasil menyebabkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat.
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini dilihat dari nilai sig uji  $t$   $0.583 > 0.05$ . Artinya Kenaikan Dana Alokasi Umum tidak mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini dilihat dari nilai sig uji  $t$   $0.00 < 0.05$ . Artinya kenaikan Dana Alokasi Khusus mampu menaikkan Indeks Pembangunan pada kabupaten di Jawa barat.
4. Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini dilihat dari nilai sig uji  $t$   $0.74 > 0.05$ . Artinya Kenaikan Dana Desa tidak mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

1. Peneliti hanya meneliti pengaruh empat variabel independen, yaitu Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan periode 4 tahun.



2. Penelitian hanya mengkaji variabel DBH, DAU, DAK, DD tidak memisahkan per bidang sesuai dimensi IPM.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Pusat : membuat kebijakan untuk Menaikkan anggaran dana alokasi khusus

Untuk Pemerintah daerah : Perlu memprioritaskan belanja modal melalui Dana Alokasi Khusus untuk daerah yang belum maju guna peningkatan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mendorong capaian Indeks Pembangunan manusia.

2. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi optimalisasi fungsi pendamping desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur pengelola Dana Desa.
3. Saran penelitian selanjutnya : diharapkan peneliti selanjutnya untuk lebih menekankan pada pada bidang bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi atau dengan menambah periode dan variabel penelitian yang langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematikan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, Jakarta : Salemba Empat, 2016.
- Afrilianto. *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bogor*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Manajemen IPB Bogor, 2017.
- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018, <http://www.ipm.bps.go.id>. didownload tanggal 13 Mei 2019.
- Badrudin Rudi. *Ekonomika otonomi daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Booklet. *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*, Jakarta : Badan Pusat Statitika, 2015.
- Budi. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2012-2014*”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Ditjen Perimbangan. Dana Transfer ke Daerah untuk Nawacita, <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/anggaran-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-untuk-mewujudkan-nawacita/>. di akses 12 maret 2019.
- Elfianto. “ Agency Theori Dalam Pespektif Syariah”. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang,.h.43.
- Erlina dan Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Jakarta : Salemba Empat, 2015.

- Fadhly. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2014.
- Harahap. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011.
- Hasan dan Agung. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2011-2015)*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, 2018.
- Hasan. *Pengaruh Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan*, Jurnal Ekonomi Volume 3, Makassar, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2015.
- Hayati dan Achasa. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, 2016
- Kementrian Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2015-2018, <http://www.kemenkeu.go.id>. didownload tanggal 30 Mei 2019.
- \_\_\_\_\_. Nota Keuangan dan APBN 2015-2018, <http://www.kemenkeu.go.id>. didownload tanggal 13 Mei 2019.
- Lestari, et.al., *Analisis Pengaruh DAU, DAK, Dan DBH Terhadap IPM Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016*, Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, 2017.

- Ma'ruf Abdullah. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif (untuk ekonomi, manajemen, komunikasi dan ilmu sosial lainnya)*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015.
- Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 230/PMK.07/2017 *Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 230/PMK.07/2017 *Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 50/PMK.07/2017 *Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 83/PMK.05/2018 *Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa*.
- Mudrajad Kuncoro. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Erlangga, 2014.
- Nursandi. *Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah: Transfer Pusat Ke Daerah, Pemerataan Keuangan Daerah Dan Kapasitas Daerah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Rafika. *Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung 2017.
- Rama Dan Makhilani. *Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Jurnal ekonomi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Republik Indonesia. Undang Undang No.32/2004 *tentang Pemerintah Daerah*.

\_\_\_\_\_. Undang Undang No.06/2004 tentang Desa.

Rifa'i. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks pembangunan Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2013*, Skripsi Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2016.

Rusydi. *Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap kesejahteraan Masyarakat Desadi Kabupaten Takalar*, Jurnal Fakultas Ekonomi Unismuh Makassar, 2012.

Siregar Baldric. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.

Siswadi. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad Dan Dan Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal*, Jurnal Manajemen Universitas Mataram, 2015.

Sukanto. *Dampak Dana Transfer Dan Peran Kelembagaan Terhadap Kinerja Pembangunan Di Provinsi Banten*, Disertasi Doktor studi perencanaan pembangunan, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2018

Winarno, W. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*. Edisi ke-4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2015

Zelmiyanti. *Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal*, Jurnal Universitas Islam '45 Bekasi.

Zulfikar. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel*. Journal of Regional and Rural Development Planning. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang. 2017

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Tabulasi Data

(dalam miliar rupiah)

Kabupaten	Tahun	IPM(%)	DBH	DAU	DAK	DD
Bandung	2015	70.05	208.1	1957.54	145.24	87.13
Bandung	2016	70.69	250.59	2096.68	645.09	195.73
Bandung	2017	71.02	318.02	2059.85	653.23	249.41
Bandung	2018	71.75	340.44	2060.2	737.02	259.47
Bekasi	2015	71.19	295.47	1256.1	68.5	60.19
Bekasi	2016	71.83	432.67	1173.51	328.12	133.57
Bekasi	2017	72.63	425.56	1152.89	312.17	170.42
Bekasi	2018	73.49	413.96	1152.89	336.46	196.71
Bogor	2015	67.77	225.63	2163.44	198.15	130.26
Bogor	2016	68.32	217.54	1917.78	506.47	292.56
Bogor	2017	69.13	289.9	1902	571.47	372
Bogor	2018	69.69	262.17	1919.02	637.62	402.07
Ciamis	2015	68.02	58.01	1156.99	127.6	74.78
Ciamis	2016	68.45	80.73	1203.48	393.59	167.84
Ciamis	2017	68.87	79.75	1182.34	458.2	213.82
Ciamis	2018	69.63	64.7	1183.06	405.37	217.29
Cianjur	2015	62.42	72.36	1443.96	213.52	106.82
Cianjur	2016	62.92	93.83	1569.95	502.32	240.41
Cianjur	2017	63.7	92.94	1542.82	576.31	307.3
Cianjur	2018	64.62	80.67	1548.38	617.13	346.45
Cirebon	2015	66.07	74.03	1431.95	185.71	125.83

Cirebon	2016	66.7	103.67	1521.88	537.45	282.55
Cirebon	2017	67.39	111.54	1495.14	481.49	360.5
Cirebon	2018	68.05	87.16	1500.54	482.73	370.24
Garut	2015	63.21	140.67	1743.14	161.4	124.93
Garut	2016	63.64	264.08	1808.71	505.81	280.44
Garut	2017	64.52	233.77	1776.94	683.36	357.74
Garut	2018	65.42	189.82	1776.94	658.9	393.54
Indramayu	2015	64.36	192.09	1287.61	198.97	93.55
Indramayu	2016	64.78	181.51	1393.87	455.87	209.95
Indramayu	2017	65.58	227.25	1369.38	419.6	267.77
Indramayu	2018	66.36	187.59	1371.77	429.38	310.92
Karawang	2015	67.66	245.08	1246.48	132.38	89.23
Karawang	2016	68.19	309.56	1250.73	342.42	200.29
Karawang	2017	69.17	350.7	1239.74	461	254.99
Karawang	2018	69.89	311.77	1245.52	491.49	280.95
Kuningan	2015	67.19	54.92	1127.61	191.99	100.36
Kuningan	2016	67.51	91.94	1218.6	420.1	225.18
Kuningan	2017	67.78	78.98	1197.2	450.23	287.11
Kuningan	2018	68.55	65	1197.2	399.73	262.3
Majalengka	2015	64.75	86.46	1115.06	165.68	93.19
Majalengka	2016	65.25	85.85	1225.93	399.65	208.98
Majalengka	2017	65.92	96.36	1204.4	394.26	267.11
Majalengka	2018	66.72	77.32	1204.4	420.42	312.49
Pangandaran	2015	65.62	37.02	523.97	58.67	27.48
Pangandaran	2016	65.79	139.59	546.73	96.91	61.68
Pangandaran	2017	66.6	67.32	538.89	207.46	78.24



Pangandaran	2018	67.44	59.29	538.88	190.11	76.68
Purwakarta	2015	67.84	71.53	808.11	43.96	51.67
Purwakarta	2016	68.56	119.75	857.56	265.99	116.03
Purwakarta	2017	69.28	111.62	850.23	299.78	148.63
Purwakarta	2018	69.98	100.69	854.42	265.88	141.72
Subang	2015	66.52	162.19	1173.19	115.33	72.78
Subang	2016	67.14	128.64	1305.61	321.67	163.51
Subang	2017	67.73	188.59	1282.68	391.37	209.21
Subang	2018	68.31	148.89	1282.68	436.39	185.34
Sukabumi	2015	64.44	130.64	1496.07	150.82	113.98
Sukabumi	2016	65.13	131.07	1595.76	495.3	255.44
Sukabumi	2017	65.49	173.23	1575.41	516.67	326.25
Sukabumi	2018	66.05	151.04	1580.42	533.28	300.9
Sumedang	2015	69.29	75.65	1118.85	79.12	77.44
Sumedang	2016	69.45	96.17	1138.93	378.6	169.41
Sumedang	2017	70.07	104.52	1119.2	379.74	217.27
Sumedang	2018	70.99	103.16	1125.8	409.72	192.46
Tasikmalaya	2015	63.17	64.03	1380.49	189.43	101.34
Tasikmalaya	2016	63.57	71.91	1467.97	537.92	227.46
Tasikmalaya	2017	64.14	79.75	1442.19	567.74	290.15
Tasikmalaya	2018	65	65.48	1451.25	550.28	322.59
Bandung Barat	2015	65.23	60.58	1030.02	69.29	1153.1
Bandung Barat	2016	65.81	139.62	1103.29	280.85	119.27
Bandung Barat	2017	66.63	96.98	1088.13	411.36	152.34
Bandung Barat	2018	67.46	81.42	1091.12	352.83	198.29

## Lampiran 2 Hasil Uji tatistik

### Statistik deskriptif

Sample: 2015 2018

	IPM	DBH	DAU	DAK	DD
Mean	67.2719444...	154.312916...	1332.79819...	368.056527...	215.764305...
Median	67.4149999...	111.58	1253.415	396.955	204.635
Maximum	73.49	432.67	2163.44	737.02	1153.1
Minimum	62.42	37.0200000...	523.97	43.96	27.48
Std. Dev.	2.51210962...	98.7079757...	364.156033...	176.806797...	147.655106...
Skewness	0.21956432...	1.16790266...	0.12235650...	-0.0857518...	3.56116627...
Kurtosis	2.45576346...	3.50778858...	3.18742226...	2.09236466...	23.5674164...

### Uji Command Effect

Dependent Variable: IPM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 08/02/19 Time: 08:08  
 Sample: 2015 2018  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 18  
 Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.53551	0.951974	70.94263	0.0000
DBH	0.015689	0.002738	5.728941	0.0000
DAU	-0.002218	0.000883	-2.511674	0.0144
DAK	0.001540	0.001828	0.842131	0.4027
DD	-0.001365	0.001859	-0.734057	0.4655
R-squared	0.346603	Mean dependent var		67.27194
Adjusted R-squared	0.307594	S.D. dependent var		2.512110
S.E. of regression	2.090350	Akaike info criterion		4.379455
Sum squared resid	292.7607	Schwarz criterion		4.537557
Log likelihood	-152.6604	Hannan-Quinn criter.		4.442396
F-statistic	8.885253	Durbin-Watson stat		0.223846
Prob(F-statistic)	0.000008			

## Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: IPM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 08/02/19 Time: 08:11  
 Sample: 2015 2018  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 18  
 Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.46383	2.336276	29.73271	0.0000
DBH	-0.004295	0.002846	-1.509028	0.1376
DAU	-0.002438	0.001727	-1.412244	0.1641
DAK	0.004562	0.000658	6.929719	0.0000
DD	0.000193	0.000571	0.337877	0.7369

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.965168	Mean dependent var	67.27194
Adjusted R-squared	0.950539	S.D. dependent var	2.512110
S.E. of regression	0.558689	Akaike info criterion	1.920021
Sum squared resid	15.60667	Schwarz criterion	2.615669
Log likelihood	-47.12074	Hannan-Quinn criter.	2.196960
F-statistic	65.97493	Durbin-Watson stat	1.913117
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Uji Random Effect Model

Dependent Variable: IPM  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 08/02/19 Time: 08:12  
 Sample: 2015 2018  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 18  
 Total panel (balanced) observations: 72  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.78264	1.425597	47.54686	0.0000
DBH	0.001041	0.002418	0.430546	0.6682
DAU	-0.001589	0.001025	-1.550673	0.1257
DAK	0.003792	0.000594	6.384993	0.0000
DD	0.000235	0.000565	0.415756	0.6789

### Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.878692	0.9187
Idiosyncratic random	0.558689	0.0813

### Weighted Statistics

R-squared	0.457669	Mean dependent var	9.893957
Adjusted R-squared	0.425291	S.D. dependent var	0.818713
S.E. of regression	0.620663	Sum squared resid	25.80991
F-statistic	14.13521	Durbin-Watson stat	1.143135
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Unweighted Statistics

R-squared	0.024604	Mean dependent var	67.27194
Sum squared resid	437.0353	Durbin-Watson stat	0.067510

## Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

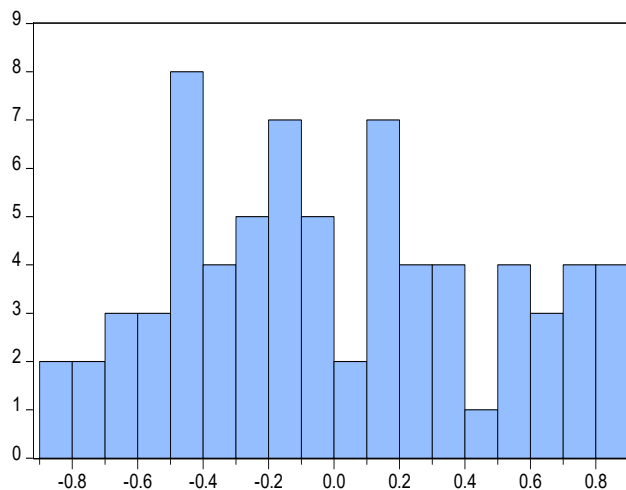
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	52.231428	(17,50)	0.0000
Cross-section Chi-square	211.079295	17	0.0000

## Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.688692	4	0.0006

## Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals  
Sample 2015 2018  
Observations 72

Mean -3.55e-17  
Median -0.081890  
Maximum 0.873407  
Minimum -0.826371  
Std. Dev. 0.468841  
Skewness 0.214452  
Kurtosis 2.048124

Jarque-Bera 3.270083  
Probability 0.194944

### Uji Multikoleniaritas

	DBH	DAU	DAK	DD
DBH	1.000.000	0.382578	0.238694	0.015056
DAU	0.382578	1.000.000	0.582013	0.272138
DAK	0.238694	0.582013	1.000.000	0.413565
DD	0.015056	0.272138	0.413565	1.000.000

### Uji Heteroskedastisitas

Weighted Statistics			
R-squared	0.968244	Mean dependent var	72.25126
Adjusted R-squared	0.954906	S.D. dependent var	17.47129
S.E. of regression	0.556228	Sum squared resid	15.46948
F-statistic	72.59520	Durbin-Watson stat	2.019656
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.964864	Mean dependent var	67.27194
Sum squared resid	15.74295	Durbin-Watson stat	1.976373

### Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.965168	Mean dependent var	67.27194
Adjusted R-squared	0.950539	S.D. dependent var	2.512110
S.E. of regression	0.558689	Akaike info criterion	1.920021
Sum squared resid	15.60667	Schwarz criterion	2.615669
Log likelihood	-47.12074	Hannan-Quinn criter.	2.196960
F-statistic	65.97493	Durbin-Watson stat	1.913117
Prob(F-statistic)	0.000000		



## Uji Fixed Effect Model GLS Cross-section Weight

Dependent Variable: IPM  
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/02/19 Time: 03:29  
Sample: 2015 2018  
Periods included: 4  
Cross-sections included: 18  
Total panel (balanced) observations: 72  
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.81730	2.336370	30.31082	0.0000
DBH	-0.005546	0.002577	-2.151783	0.0363
DAU	-0.003388	0.001750	-1.935727	0.0586
DAK	0.004845	0.000641	7.558538	0.0000
DD	0.000200	0.000614	0.326167	0.7457

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.968244	Mean dependent var	72.25126
Adjusted R-squared	0.954906	S.D. dependent var	17.47129
S.E. of regression	0.556228	Sum squared resid	15.46948
F-statistic	72.59520	Durbin-Watson stat	2.019656
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Lampiran 3 Tabel Distribusi

#### Chi Square Tabel

<i>df</i>	$\chi^2_{.995}$	$\chi^2_{.990}$	$\chi^2_{.975}$	$\chi^2_{.950}$	$\chi^2_{.900}$	$\chi^2_{.100}$	$\chi^2_{.050}$	$\chi^2_{.025}$	$\chi^2_{.010}$	$\chi^2_{.005}$
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490
60	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952
70	43.275	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215
80	51.172	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321
90	59.196	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
100	67.328	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169



## Durbin Watson Tabel

**Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$**

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538	1.5542	1.7776
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546	1.5572	1.7781
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553	1.5600	1.7785
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560	1.5628	1.7790
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567	1.5656	1.7795
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575	1.5683	1.7799
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7582	1.5710	1.7804
101	1.6558	1.6958	1.6357	1.7163	1.6153	1.7374	1.5946	1.7589	1.5736	1.7809
102	1.6576	1.6971	1.6376	1.7175	1.6174	1.7383	1.5969	1.7596	1.5762	1.7813
103	1.6593	1.6985	1.6396	1.7186	1.6196	1.7392	1.5993	1.7603	1.5788	1.7818
104	1.6610	1.6998	1.6415	1.7198	1.6217	1.7402	1.6016	1.7610	1.5813	1.7823
105	1.6627	1.7011	1.6433	1.7209	1.6237	1.7411	1.6038	1.7617	1.5837	1.7827
106	1.6644	1.7024	1.6452	1.7220	1.6258	1.7420	1.6061	1.7624	1.5861	1.7832
107	1.6660	1.7037	1.6470	1.7231	1.6277	1.7428	1.6083	1.7631	1.5885	1.7837
108	1.6676	1.7050	1.6488	1.7241	1.6297	1.7437	1.6104	1.7637	1.5909	1.7841
109	1.6692	1.7062	1.6505	1.7252	1.6317	1.7446	1.6125	1.7644	1.5932	1.7846
110	1.6708	1.7074	1.6523	1.7262	1.6336	1.7455	1.6146	1.7651	1.5955	1.7851
111	1.6723	1.7086	1.6540	1.7273	1.6355	1.7463	1.6167	1.7657	1.5977	1.7855
112	1.6738	1.7098	1.6557	1.7283	1.6373	1.7472	1.6187	1.7664	1.5999	1.7860
113	1.6753	1.7110	1.6574	1.7293	1.6391	1.7480	1.6207	1.7670	1.6021	1.7864
114	1.6768	1.7122	1.6590	1.7303	1.6410	1.7488	1.6227	1.7677	1.6042	1.7869
115	1.6783	1.7133	1.6606	1.7313	1.6427	1.7496	1.6246	1.7683	1.6063	1.7874
116	1.6797	1.7145	1.6622	1.7323	1.6445	1.7504	1.6265	1.7690	1.6084	1.7878
117	1.6812	1.7156	1.6638	1.7332	1.6462	1.7512	1.6284	1.7696	1.6105	1.7883
118	1.6826	1.7167	1.6653	1.7342	1.6479	1.7520	1.6303	1.7702	1.6125	1.7887
119	1.6839	1.7178	1.6669	1.7352	1.6496	1.7528	1.6321	1.7709	1.6145	1.7892
120	1.6853	1.7189	1.6684	1.7361	1.6513	1.7536	1.6339	1.7715	1.6164	1.7896
121	1.6867	1.7200	1.6699	1.7370	1.6529	1.7544	1.6357	1.7721	1.6184	1.7901
122	1.6880	1.7210	1.6714	1.7379	1.6545	1.7552	1.6375	1.7727	1.6203	1.7905
123	1.6893	1.7221	1.6728	1.7388	1.6561	1.7559	1.6392	1.7733	1.6222	1.7910
124	1.6906	1.7231	1.6743	1.7397	1.6577	1.7567	1.6409	1.7739	1.6240	1.7914
125	1.6919	1.7241	1.6757	1.7406	1.6592	1.7574	1.6426	1.7745	1.6258	1.7919
126	1.6932	1.7252	1.6771	1.7415	1.6608	1.7582	1.6443	1.7751	1.6276	1.7923
127	1.6944	1.7261	1.6785	1.7424	1.6623	1.7589	1.6460	1.7757	1.6294	1.7928
128	1.6957	1.7271	1.6798	1.7432	1.6638	1.7596	1.6476	1.7763	1.6312	1.7932
129	1.6969	1.7281	1.6812	1.7441	1.6653	1.7603	1.6492	1.7769	1.6329	1.7937
130	1.6981	1.7291	1.6825	1.7449	1.6667	1.7610	1.6508	1.7774	1.6346	1.7941
131	1.6993	1.7301	1.6838	1.7458	1.6682	1.7617	1.6523	1.7780	1.6363	1.7945
132	1.7005	1.7310	1.6851	1.7466	1.6696	1.7624	1.6539	1.7786	1.6380	1.7950
133	1.7017	1.7319	1.6864	1.7474	1.6710	1.7631	1.6554	1.7791	1.6397	1.7954
134	1.7028	1.7329	1.6877	1.7482	1.6724	1.7638	1.6569	1.7797	1.6413	1.7958
135	1.7040	1.7338	1.6889	1.7490	1.6738	1.7645	1.6584	1.7802	1.6429	1.7962
136	1.7051	1.7347	1.6902	1.7498	1.6751	1.7652	1.6599	1.7808	1.6445	1.7967

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama : M. Afrizal Yusuf  
Tempat, Tgl Lahir : Jepara, 21 November 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat Tinggal : Jl. Bendansari, RT 04 RW 02 Tahunan Jepara  
Telp : 0852-9075-2233  
Email : m.21afrizal@gmail.com  
Nama Ayah : Supar  
Nama Ibu : Zuafa

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

2003 – 2009 SD Negeri 06 Tahunan  
2009 – 2012 SMP Negeri 01 Tahunan  
2012 – 2015 SMA Negeri 01 Tahunan  
2015 – 2019 S1 Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota BPKMJ Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang masa bakti 2015-2016.
2. Anggota EBI SPORT UIN Walisongo Semarang masa bakti 2016-2017.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis,

**M. Afrizal Yusuf**

**NIM. 1505046055**

